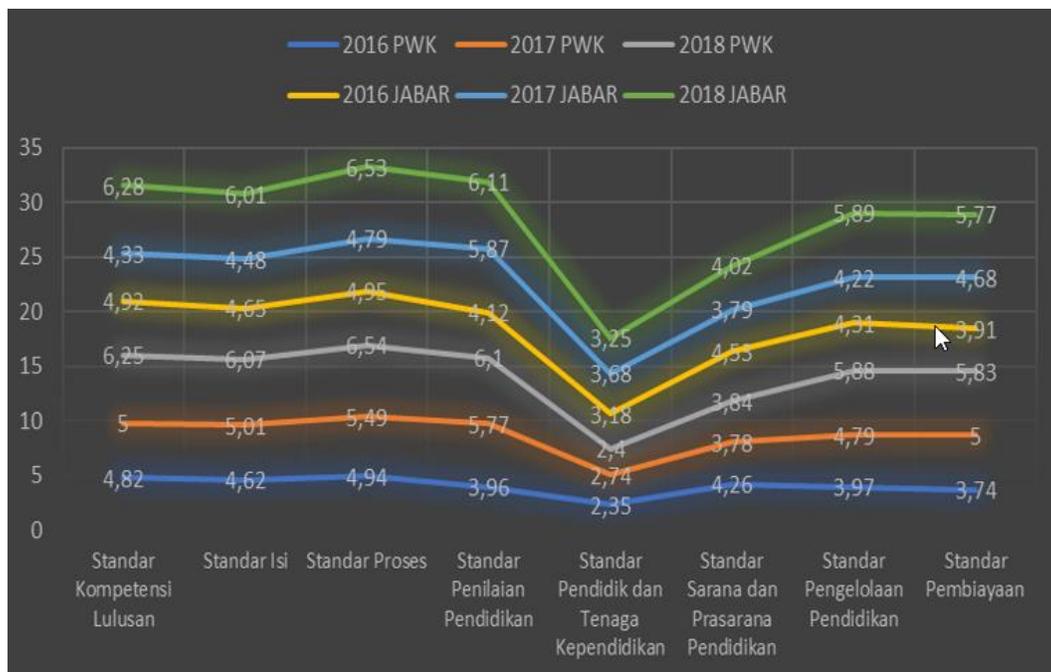


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Manajemen sekolah merupakan suatu proses bagaimana suatu organisasi pendidikan dijalankan untuk mencapai tujuan, visi, dan misinya serta merupakan bagian dari manajemen pendidikan, dimana lingkup pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pendidikan formal, non- formal, dan informal. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Menurut Triatna (2015, hlm. 27) “sekolah merupakan pendidikan dalam bentuk lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahapan dan perkembangannya”.

Manajemen sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola sekolah seringkali menjadikan pihak sekolah belum mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, khususnya bagi peserta didik itu sendiri, sehingga muncul berbagai keluhan dari peserta didik, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat umum, bahwa dalam pendidikan yang dilaksanakan di sekolah masih ada beberapa faktor yang belum memenuhi standar mutu pendidikan. Kondisi ini bukanlah suatu asumsi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dilihat pada data capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) berikut ini.



**Gambar 1.1** Capaian 8 SNP pada tingkat nasional di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018

Sumber: Diolah dari data PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, per tanggal 15 Maret 2020. Alamat website: <http://118.98.228.27/rnpk/index.php?d=1>

Novia Sartika Putri, 2020

*PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN PENGANGGARAN SEKOLAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Standar Nasional Pendidikan	Kab. Purwakarta			Provinsi Jawa Barat		
		2016 PWK	2017 PWK	2018 PWK	2016 JABAR	2017 JABAR	2018 JABAR
1	Standar Kompetensi Lulusan	4,82	5	6,25	4,92	4,33	6,28
2	Standar Isi	4,62	5,01	6,07	4,65	4,48	6,01
3	Standar Proses	4,94	5,49	6,54	4,95	4,79	6,53
4	Standar Penilaian Pendidikan	3,96	5,77	6,1	4,12	5,87	6,11
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,35	2,74	2,4	3,18	3,68	3,25
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,26	3,78	3,84	4,53	3,79	4,02
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,97	4,79	5,88	4,31	4,22	5,89
8	Standar Pembiayaan	3,74	5	5,83	3,91	4,68	5,77

**Gambar 1.2 Capaian 8 SNP pada tingkat nasional di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018**

Sumber: Diolah dari data PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, per tanggal 15 maret 2020. Alamat website; <http://118.98.228.27/rnpk/index.php?d=1>

Dari capaian standar nasional pendidikan di tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwasanya pendidikan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan kondisi yang masih belum memenuhi standar. Adapun untuk pencapaian Standar Pengelolaan di Provinsi Jawa barat baru mencapai 4,31 (2016), 4,22 (2017) dan 5,89 (2018) sedangkan di Kabupaten Purwakarta mencapai nilai 3.97 (2016), 4.79 (2017), 5.88 (2018). Masih ada beberapa faktor yang belum memenuhi standar, dikatakan sekolah berstandar apabila memenuhi standar yang ditandai dengan skor 7. Hal ini menunjukkan masih rendahnya angka ketercapaian dan hal ini menunjukkan masalah yang perlu dipecahkan

Novia Sartika Putri, 2020

*PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN PENGANGGARAN SEKOLAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara sistematis, mengingat pemenuhan 8 SNP sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai 2018 atau kurang lebih selama 12 tahun, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada level satuan pendidikan (sekolah), pemenuhan standar pengelolaan ini masih menjadi kebingungan bagi banyak kepala sekolah dikarenakan mereka belum memahami bagaimana seharusnya melakukan proses manajemen sekolah. Triatna, Hartini & Rosalin (2019, hlm. 105) menegaskan bahwa proses umum manajemen sekolah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan evaluasi.

Dilihat dari proses umum manajemen sekolah, fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi manajemen sekolah yang memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan (Onismura, 2011, hlm. 64-65). Karena sekalipun konseptual perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sudah disusun tetapi jika tidak ditunjang dengan penganggaran yang tepat maka akan menghambat seluruh proses pengelolaan pendidikan.

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*) (Fattah, 2009, hlm. 47). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Knezevich (1969:75) dalam Triatna (2019, hlm. 171) mengemukakan budgeting merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. Masih dalam Triatna (2019, hlm. 171) Komarudin (1979) mengemukakan budgeting sebagai alat perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam periode tertentu dengan melakukan prakiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pengawasan pelaksanaannya. Oleh karena itu budgeting merupakan alat perencanaan juga sebagai alat pengendali.

Pada UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berisikan bahwa:

“pelaksanaan pendidikan diselenggarakan secara otonom pada tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan tingkat provinsi untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Otonomi penyelenggaraan pendidikan ini menyebabkan pengelolaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota, termasuk memastikan sekolah memiliki dana operasional sekolah sesuai standar pembiayaan pendidikan”.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendidikan pada Informasi APBN 2019 yaitu 492,5 triliun Rupiah dengan pertumbuhan 13,2 %. Anggaran pendidikan yang didistribusikan melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 308,4 triliun Rupiah.

Urusan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Bandung, Tahun 2014-2018, hlm. 177) di antaranya belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SPP, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah, biaya pendidikan sekolah menengah masih membebani orangtua peserta didik.

Dalam jurnal Administrasi Pendidikan Afriliana Fitri (2020) mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittingi, menemukan adanya masalah yaitu sejak dana BOS dikeluarkan belum terlihat indikasi yang belum menggembirakan dimana dana BOS kurang menampakkan pengaruh yang signifikan terhadap mutu pendidikan di sekolah. Sekolah masih merasakan

Novia Sartika Putri, 2020

*PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN PENGANGGARAN SEKOLAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

kekurangan dana untuk penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dikarenakan: (1) Masih ada juga sekolah yang kurang transparansi dan tidak melibatkan komite sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOS, (2) Masih ada sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana BOS, (3) Audit Bawasda Kota Bukittinggi menemukan bahwa banyak sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan pengeluaran, (4) Berdasarkan informasi dari Tim manajemen Bos Kota Bukittinggi dimana ada beberapa sekolah yang laporan pertanggungjawaban dana BOS ditolak dan dikembalikan, Hal ini disebabkan oleh sistem pelaporannya yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Mencermati permasalahan tata kelola pada satuan pendidikan dalam manajemen sekolah saat ini, dilihat dari fungsi penganggaran pendidikan yaitu sekolah tidak memahami bagaimana kondisi kesehatan penganggaran dan bagaimana cara melakukan penyehatan penganggaran sekolah. Peneliti mendeteksi, perlu adanya suatu alat atau media yang dapat mengukur kondisi kesehatan manajemen sekolah, yang menjadi dasar dalam peningkatan mutu sekolah tersebut.

Upaya pemecahan masalah yang tidak didasarkan pada hasil analisis, maka tidak akan memecahkan masalah yang ada, akan tetapi malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Oleh sebab itu, alternative pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengelola pendidikan dalam manajemen sekolah memerlukan media berupa instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi kesehatan (penyakit) manajemen pendidikan khususnya berfokus dalam mengukur kesehatan penganggaran sekolah. Triatna (2018, hlm. 36) mengkategorikan bentuk penyakit organisasi Pendidikan ke dalam tiga jenis, yaitu (1) ketidaksesuaian, (2) ketidakberfungsian, dan (3) kekurangan.

Selanjutnya pada penelitian Wiwit Setiawati pada tahun 2019 mengenai Diagnosis Kesehatan Penganggaran Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2019 dijelaskan bahwa Dimensi Kesehatan Penganggaran Sekolah terdiri dari prinsip, proses dan akuntabilitas penganggaran. Kemudian dimensi dan indikator diagnosis kesehatan penganggaran sekolah mengalami perkembangan, Wiwit menambahkan konsep pada proses penganggaran dari Lipham (1985). Pemaduan konsep pada dimensi proses penganggaran tahap uji coba lapangan awal yaitu ditambahkan indikator dan item yang dikutip dari Mulyasa (2013, hlm. 198-206) yaitu perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan sekolah, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pemaduan konsep proses penganggaran dilakukan untuk melengkapi hal-hal yang belum terdapat pada konsep proses penganggaran Sorenson dan Goldsmith (2013, hlm. 24-29).

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian tahun sebelumnya (penelitian ini tahun ke-3) bahwasannya hasil penelitian tahun ke-1 telah menghasilkan pengetahuan dan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah sebagai bagian dari instrumen diagnosis kesehatan manajemen sekolah. Selain itu, terdapat urgensi penelitian ini perlu dilaksanakan diantaranya:

1. Renstra UPI 2016-2020, khususnya pada halaman 72 dan 73, yaitu:  
“Terselenggaranya riset yang berorientasi pada produk unggulan dalam berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelesaian isu-isu nasional dan internasional.”
2. Perlunya Departemen Administrasi Pendidikan, khususnya laboratorium Administrasi Pendidikan memiliki instrument diagnose kesehatan (penyakit) manajemen sekolah terstandar sebagai *knowledge*

*capital* UPI yang akan menjadi *income generating* secara kelembagaan.

3. Pengelola dan penyelenggara sekolah sangat memerlukan instrumen terstandar dalam mendiagnosa penyakit manajemen sekolah dan melakukan pemecahan masalah secara terstandar.

Maka dari itu, pada penelitian ini akan menjadi bagian untuk membangun instrumen diagnosis kesehatan manajemen sekolah, khususnya kesehatan penganggaran sekolah dalam bentuk pengembangan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah yang terstandarisasi dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, Penelitian ini akan melakukan pengujian lebih meluas pada pendidikan jenjang menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Purwakarta dengan pengambilan data berbasis online menggunakan aplikasi Google *form* serta untuk mengetahui kondisi sehat atau tidaknya mengenai kesehatan penganggaran sekolah. Dari penjabaran di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengembangan Instrumen Diagnosis Kesehatan Penganggaran Sekolah “**

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah?
2. Bagaimanakah gambaran hasil diagnosis kesehatan penganggaran sekolah?
3. Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil penggunaan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menggambarkan instrumen kesehatan penganggaran sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta se-Kabupaten Purwakarta.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah.
2. Untuk mengetahui gambaran hasil instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil penggunaan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah.

### **1.4. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat secara teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat dan diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam mengembangkan ilmu Patologi Organisasi Pendidikan, khususnya dalam pengembangan instrumen kesehatan penganggaran sekolah.

#### **1.4.2. Manfaat secara praktis**

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi kepala sekolah, guru, dan staff tata usaha untuk menjadi alat dan bahan pengembangan instrumen kesehatan penganggaran sekolah.

### 1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk Mempermudah Pembaca melihat dan memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori –teori yang melandasi penelitian, diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang mendukung. Konsep-konsep dan teori-teori dalam penelitian ini yaitu mengenai kesehatan penganggaran sekolah.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode Penelitian komponen penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif*
- BAB IV : Temuan dan pembahasan, memuat pengolahan atau analisis data beserta pembahasan atau analisis hasil temuan di lapangan dengan pemaparan dan pembahasan data yang disajikan.
- BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yang meyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang

dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut

Novia Sartika Putri, 2020

*PENGEMBANGAN INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN PENGANGGARAN SEKOLAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)